

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa, "...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...". Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

---

<sup>1</sup> Indra Gosal, *Elektabilitas Syahrul Yasin Limpo Pada Pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, 2015.

Undang-undang otonomi daerah disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014, undang-undang otonomi daerah diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Otonomi daerah merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri di wilayahnya.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung diharapkan akan menghasilkan *figure* kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate*. Pemilukada langsung akan mendekatkan pemerintah dengan yang diperintah dan akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju kepada rakyat. Disamping itu pemilukada langsung merupakan tuntutan dan desakan rakyat yang menghendaki bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi rakyat dapat menggunakan hak politiknya secara langsung seperti pada pemilihan presiden. Dengan demikian suara rakyat tidak lagi digadaikan kepada politisi di DPRD dan anggota dewan tidak dapat sepenuhnya memainkan dan memonopoli suara rakyat di daerah. Sehubungan dengan hal ini maka wacana mengenai pemilukada langsung terus bergulir.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Rambe Kamarul Zaman, "*Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*", Expose; PT Mizan Publika, Jakarta Selatan, 2016. Hlm. 190

Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan Jambi Kota Beradat. Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa mempunyai mobilitas penduduk yang tinggi. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, dengan tetap berpedoman pada RT RW Kota Jambi dan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah juga.<sup>4</sup>

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan. Berdasarkan data tahun 2008 – 2012, keadaan penduduk Kota Jambi cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2012 pertumbuhannya

---

<sup>4</sup> RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018

mencapai 3,14 persen. Hal ini sudah menjadi fenomena daerah perkotaan yang merupakan tujuan para migran terdidik untuk mencari pekerjaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bukan karena kelahiran alamiah, melainkan penduduk migran yang semakin meningkat.

Kecamatan Kota Baru merupakan salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Kecamatan ini terletak di pusat kota dan merupakan pusat pemerintahan. Kecamatan Kota Baru terdiri dari 10 kelurahan. Kecamatan Kota Baru memiliki 349 Rukun Tetangga. Kecamatan Kota Baru selain merupakan pusat pemerintahan Kota Jambi juga merupakan pusat pendidikan. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Kota Baru adanya sarana pendidikan, mulai dari pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi. Kecamatan Kota Baru merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jambi. Hal ini tentu berimbas pada kepadatan penduduknya. Kecamatan Kota Baru memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya yaitu sebesar 2.052 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Masyarakat pada Kecamatan Kota Baru ini memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda. Dilihat dari tingkat pendidikan terakhir masyarakat yang berusia diatas 30 tahun banyak yang SMA/Sederajat maupun sedang melaksanakan S1. Sedangkan dilihat dari pekerjaan, masyarakat Kecamatan Kota Baru ini banyak yang Pegawai Negeri Sipil maupun swasta yang mana banyak bekerja di sektor pemerintahan kota maupun daerah. Pada sebagian masyarakat ada juga yang bertani, dan berkebun (sawah, sawit dan karet).

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2014

Mengambil, membuat dan menerima keputusan ataupun melaksanakan keputusan dari peraturan pemerintahan daerah merupakan bagian dari perilaku politik yang baik. Tingkah laku maupun kebiasaan sehari-hari dalam bermasyarakat seperti turut serta di dalam proses bernegara, turut serta di dalam organisasi maupun perkumpulan di masyarakat yang terjadi secara alami, berperan serta dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada), melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan sebagainya, merupakan sebagai bentuk perilaku politik dari masyarakat.<sup>6</sup>

Partisipasi pada dasarnya merupakan kegiatan warga negara dalam rangka ikut serta menentukan berbagai macam kepentingan hidupnya dalam ruang lingkup dan konteks masyarakat atau negara itu sendiri. Dalam sistem negara demokratis, partisipasi politik merupakan elemen yang penting. Partisipasi politik juga merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.<sup>7</sup>

Pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang terbiasa, yang seringkali lebih luas dibandingkan dengan partisipasi politik lain. Kegiatan partisipasi politik itu meskipun kelihatannya hanyalah menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja untuk membantu pemilihan dan

---

<sup>6</sup> Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992, hal 131

<sup>7</sup> Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hal.67



tindakan-tindakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik kolektif yang besar yang telah membedakannya dari partisipasi politik yang lain.<sup>8</sup>

Pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Provinsi Jambi, dimenangkan oleh pasangan Zumi Zola Zulkifli STP, MA dan H. Fachrori Umar, M. Hum yang diusung dari Partai Nasdem, PKB, PAN, Partai Hanura, dan PBB. Dalam pemilihan kepala daerah langsung itu pasangan Zumi Zola Zulkifli dan Fachrori Umar memperoleh suara terbanyak, yaitu sebesar 965.655 suara sah di Provinsi Jambi.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.483.426 orang dengan 7.067 TPS yang ada di Provinsi Jambi. Jumlah seluruh hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 1.660.093 orang. Pada tabel berikut ini disajikan hasil perolehan suara per-Kecamatan dan per-Kelurahan di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015.

**Tabel 1.1**

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>9</sup> Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2015

**Hasil Perolehan Suara per-Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Perolehan Suara			
		HBA – EDI Purwanto	Persentase %	ZZ – Fachrori Umar	Persentase %
1.	Pelayangan	5.522	2,02 %	1.887	0,69 %
2.	Danau Teluk	5.125	1,88 %	1.951	0,71 %
3.	Pasar Jambi	1.972	0,72 %	3.917	1,43 %
4.	Jambi Timur	12.681	4,66 %	27.658	10,16 %
5.	Jelutung	10.229	3,75 %	19.385	7,12 %
6.	Telanai Pura	14.743	5,41 %	30.364	11,16 %
7.	<b>Kota Baru</b>	<b>24.889</b>	<b>9,14 %</b>	<b>49.567</b>	<b>18,21 %</b>
8.	Jambi Selatan	21.143	7,77 %	41.040	15,08 %
<b>Jumlah</b>		<b>96.304</b>	<b>35,39 %</b>	<b>175.769</b>	<b>64,60 %</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>272.073</b>			

*Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pilgub Tahun 2015 - KPU Kota Jambi*

**Tabel 1.2**

**Hasil Perolehan Suaraper-Kelurahan Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015**

No.	Kelurahan	Perolehan Suara	
		HBA – EDI Purwanto	ZZ – Fachrori Umar
1.	Bagan Pete	1.969	3.877
2.	Beliung	1.187	2.522
3.	Kenali Asam Atas	1.226	2.470
4.	Kenali Asam Bawah	3.019	5.764
5.	Kenali Besar	5.659	10.961
6.	Mayang Magurai	2.534	5.842
7.	Paal Lima	2.295	4.442
8.	Rawasari	2.529	4.979
9.	Simpang Tiga Sipin	3.091	6.278
10.	Suka Karya	1.380	2.432
<b>Jumlah</b>		<b>24.889</b>	<b>49.567</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>74.456</b>	

*Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pilgub Tahun 2015 - KPU Kota Jambi*

Dari tabel hasil perolehan suara per-Kelurahan Kecamatan Kota Baru dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, suara terbanyak diperoleh pasangan nomor urut 2 yaitu Zumi Zola Zulkifli dan Fachrori Umar yang diusung Partai Nasdem, PKB, PAN, Partai Hanura dan PBB, dengan perolehan suara sebanyak 49.567 suara sah. Sedangkan pasangan nomor urut 1 yaitu Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto yang diusung Partai Demokrat, PDIP, PKS dan Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 24.889 suara sah.

Kemenangan Zumi Zola pada Pemilihan Gubernur Tahun 2015 di Provinsi Jambi diduga karena faktor ketokohan. Zumi Zola pernah membintangi sejumlah film layar lebar maupun sinetron di beberapa stasiun televisi swasta nasional. Karir politik Zumi Zola tidak terlepas dari kesuksesan sang ayah yakni Zulkifli Nurdin. Jauh sebelum Zumi Zola terjun ke dunia politik, orangtuanya yang berlatarbelakang keluarga saudagar kaya di Jambi terpilih sebagai Gubernur Jambi selama 2 periode. Zulkifli Nurdin juga sukses mengantarkan istrinya, Ratu Munawaroh duduk sebagai anggota DPR. Namun di tengah jalan, dengan alasan kesibukan, Ratu Munawaroh memilih mundur sebagai wakil rakyat.<sup>10</sup>

Selain itu, selama menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola juga meraih sejumlah penghargaan, antara lain dari Mendagri, berupa penghargaan atas komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan e-KTP, sehingga Tanjung Jabung Timur berhasil mencapai Target Perekaman e-KTP

---

<sup>10</sup>Dikutip dari “Liputan 6” (<http://www.liputan6.com/30123/kemenangan-zumi-zola-pada-pilkada-serentak>) diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 20.00



lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Saat masih menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola juga tercatat sebagai penerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI terkait laporan keuangan 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan. Selanjutnya, alumnus *S2 London Metropolitan University* pada 2007 itu juga penerima penghargaan dari Presiden RI berupa Satya Lencana Pembangunan prestasi dalam pembangunan di bidang pertanian.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melihat adanya elektabilitas sebagai pemimpin. Elektabilitas adalah ukuran/tingkat keterpilihan. Ukuran keterpilihan yang dimaksud adalah sejauh mana peluang seseorang dapat dipilih untuk memimpin suatu komunitas dalam regional wilayah tertentu. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Tetapi dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa elektabilitas yang dimaksudkan adalah elektabilitas yang didapatkan dengan bukti nyata dan kepercayaan dari masyarakat. Elektabilitas dari pemimpin yang memiliki integritas bukan pemimpin instan. Jika elektabilitas yang seperti ini sudah dimiliki maka akan mudah dalam memimpin. Rakyat yang sudah mengenal dan percaya akan dengan sangat senang hati mengikuti keinginan pemimpinnya. Dampaknya adalah program-

---

<sup>11</sup> Dikutip dari “Teropong Senayan” (<http://www.teropongsenayan.com/30535-zumi-zola-dari-artis-hingga-ke-gubernur-ganteng>) diakses pada tanggal 7 September 2017 pukul 20.45

program akan mudah terlaksana karena orang-orang yang dipimpin akan memberikan dukungan.<sup>12</sup>

Zumi Zola juga bernaung dibawah Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga dinaungi oleh ayahnya, Zulkifli Nurdin. Sebelum menjabat sebagai bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola diangkat sebagai ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur periode 2010-2015. Kemudian, Zumi Zola juga menjadi ketua DPW Barisan Penegak Amanat Nasional periode 2010-2015. Terpilihnya Zumi Zola menjadi gubernur juga bersamaan dengan terpilihnya ia menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi periode 2015-2020.<sup>13</sup>

Pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi bakal meraih sekitar 50 persen kursi. Berdasarkan hasil pleno tersebut, untuk DPRD Provinsi Jambi, PAN meraih 44.786 suara, disusul Partai Golkar 16.771 suara, Demokrat 12.848 suara, PBB 8.908 suara, PDI Perjuangan 8.880 suara, Nasdem 6.376 suara. Jelas terlihat bahwasannya PAN lebih unggul dari beberapa partai lainnya dan lebih banyak mendapatkan kursi di DPRD. Dapat dilihat dari Pemilu Legislatif, PAN selalu mendapatkan suara dan kursi yang lebih unggul.<sup>14</sup>

Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli, STP, MA dan Wakil Gubernur Jambi, DR. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, dilantik oleh Presiden Republik Indonesia RI, Joko Widodo di Istana Negara bersama tujuh Gubernur yang mengikuti Pilkada

---

<sup>12</sup> *Op Cit*, Indra Gosal

<sup>13</sup> Dikutip dari "Media Jambi" (<http://www.mediajambi.com/2016/02/biodata-gubernur-jambi-zumi-zola-dari>) diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 19.12

<sup>14</sup> Dikutip dari "Antara Jambi" (<http://www.antarajambi.com/berita/303484/pan-berjaya-di-tanjung-jabung-timur>) diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 16.00

serentak 9 Desember lalu. Lima tahun memimpin, mereka akan menjadikan Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (Tuntas) 2021. Kepercayaan masyarakat terhadap visi dan misi dari Partai Amanat Nasional (PAN), selalu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Besar harapan masyarakat Jambi kepada gubernur dan wakil gubernur baru agar mampu mewujudkan Jambi lebih baik, ditengah-tengah anjloknya harga karet, kelapa sawit, batubara, dan minyak dunia.<sup>15</sup>

Dalam kampanyenya pada Pilkada gubernur Jambi pada tanggal 9 Desember 2015, pasangan Zumi Zola dan Fachrori Umar juga menyampaikan enam poin misi. Pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik. Kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender. Ketiga, menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum. Misi ke empat adalah meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri. Kelima adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, misi ke enam adalah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal.

---

<sup>15</sup>Dikutip dari “Suara Jambi” (<http://suarajambi.com/read/2017/01/07/1922/gubernur-zola-sampaikan-visi-dan-misi-jambi-tuntas-pada-hut-provinsi-jambi-ke60>) diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 21.09

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan psikologis dengan variabel identifikasi kepartaian, orientasi terhadap kandidat serta orientasi terhadap isu-isu yang berkembang. Konsep psikologi yang juga memberi pengaruh terhadap keinginan seseorang ikut memilih dalam pemilihan umum adalah *civic duty*. *Civic duty* adalah adanya rasa tanggungjawab seseorang sebagai warganegara. Seseorang merasa bertanggungjawab memberikan suara karena adanya anggapan bahwa suaranya itu akan memberikan berbagai dampak positif.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat adanya pengaruh identifikasi kepartaian, orientasi kandidat dan orientasi isu-isu yang berkembang dengan perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Dapat dilihat dari strategi PAN dalam memenangkan Zumi Zola adalah dengan mencalonkan Zumi di daerah yang memang menjadi basis sosial keduanya. Popularitas yang tinggi adalah salah satu faktor yang menyebabkan Zumi Zola menang. Tetapi, popularitas bukan faktor utama kemenangan Zumi Zola. Mereka juga perlu dibekali dengan persepsi bahwa calon tersebut mampu membawa perubahan, mampu membangun, dan mampu menjalankan roda pemerintahan. Diikuti oleh faktor lain terutama persepsi kemampuan. Zumi Zola diperkuat dengan *track record*-nya menjadi Bupati di Tanjung Jabung Timur dan Zumi Zola selain artis juga ditunjang oleh faktor Bapaknya mantan Gubernur Jambi yang cukup berpengaruh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan psikologis dengan variabel identifikasi kepartaian, orientasi kandidat, dan orientasi terhadap isu-isu yang

berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah pengaruh identifikasi kepartaian, orientasi kandidat dan orientasi isu-isu yang berkembang dengan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di tingkat Kota Jambi.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015?
2. Bagaimanakah pengaruh orientasi kandidat dengan perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015?
3. Bagaimanakah pengaruh orientasi isu-isu yang berkembang dengan perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah:



1. Untuk menjelaskan pengaruh identifikasi kepartaian terhadap perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan pengaruh orientasi kandidat terhadap perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.
3. Untuk menjelaskan pengaruh orientasi isu-isu yang berkembang terhadap perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kota Baru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, dapat dijadikan referensi bagi penulis lain yang juga mempunyai minat dan ketertarikan terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Kota Baru.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan peningkatan terhadap perilaku memilih kepada masyarakat. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini juga akan menjadi input bagi pemerintah dan khususnya bagi komisi pelaksana pemilihan umum baik itu KPU ataupun KPUD, agar memperhatikan dan membantu dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.